

MENEMUKAN MODAL PENGAKARAN PARTAI MELALUI PEMBENAHAN WAJAH PARTAI DI LEVEL ORGANISASI DAN LEVEL PEMERINTAHAN

Andi Ali Said Akbar
Syah Firdaus

Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Kampus No.1 Grendeng Purwokerto
alisaid_pol@yahoo.co.id

Abstrak

Partai memiliki tiga arena interaksi dan kontestasi yang saling mempengaruhi. Pertama, partai di pemerintahan. Banyak kandidat publik partai yang gagal menjadi pemimpin inovatif dan justru menjadi pelaku utama korupsi. Kedua, wajah partai di parlemen. Produktivitas legislatif pusat dan daerah sangat rendah dan mengecewakan. Kehadiran dan mutu produk legisasinya tidak mencerminkan posisi strategisnya sebagai wakil rakyat. Kedua wajah itu berdampak pada respon partai diwajah ketiga yaitu ditengah masyarakat. Gejala deparpolisasi mewabah terlihat dari angka golput dan swing voters semakin tinggi. Partai harus berbenah ditiga arena jika tidak ingin tersingkir dari benak publik. Reformasi partai ditiga wajah melalui perbaikan sisem kaderisasi dan kandidasi, penguatan kapasitas kandidat publik serta adaptasi program populis.

Kata Kunci: Tiga Wajah Partai, Deparpolisasi, Reformasi Partai.

Abstract

Party has three arenas of interaction and interplay contestation. First, the party in government. Many public party candidate who fails to be an innovative leader and became the main perpetrators of corruption. Second, the face of the party in parliament. National and local legislative productivity is very low and disappointing. The presence and quality of product legislation does not reflect its strategic position as a representative of the people. Both face the impact on response diwajah third party that is in the community. Symptoms of plague deparpolisasi seen from the figures that abstentions and the higher the swing voters. Party should clean ditiga arena if not eliminated from the public mind. Reform Party ditiga face through regeneration and repair sisem kandidasi, strengthening the capacity of public candidates and adaptation populist program.

Keywords: *Three Faces Party, Deparpolisasi, Reform Party.*

Untuk kesekian kalinya, partai politik di Indonesia terus didera kritik dan sikap antipati dari segenap masyarakat Indonesia. Tentu menjadi kesulitan tersendiri menguatkan posisi partai sebagai syarat mutlak berdemokrasi ditengah tingkat kepuasan publik terhadap partai semakin menurun, tingkat partisipasi politik yang kian suram. Kekeroposan partai, tidak hanya melanda partai yang baru hadir dan belajar bereksperimen politik namun juga

telah melanda partai-partai tua, besar serta kenyang asam garam perpolitikan. Mari kita kembali menelisik ruang-ruang gelap partai politik kita.

Dengan menggunakan logika teoritisasi tiga wajah parrtai politik yang dikembangkan oleh Katz and Maier menunjukkan penampilan partai mengalami kemerosotan yang parah. pertama; wajah partai dalam pemerintahan. Kader Partai masih menjadi tersangka utama institusi

yang tidak peka sama sekali terhadap rakyat. Buruknya kinerja kader partai politik di pemerintahan sejak reformasi dapat disimak melalui data ICW 2007-2008.

Data tersebut menunjukkan 4 aktor yang menduduki rangking teratas korupsi adalah Kepala Daerah, Pejabat Pemda, Swasta dan Anggota DPR/DPRD.¹ Sekitar 70 persen kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, di Bandung. Dikatakan Denny, data tersebut diambilnya dari Kementerian Dalam Negeri sejak 2004 hingga Februari 2013. Berdasarkan data tersebut, sedikitnya 291 kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota terlibat dalam kasus korupsi.²

Kedua, wajah partai dalam parlemen. Sebagai gambaran anggota DPR kehadirannya dalam rapat-rapat legislatif terbilang sangat rendah, bahkan ketika rapat paripurna mempelajari laporan kinerja tahunan pemerintah menunjukkan angka ketidakhadiran anggota dewan cukup tinggi, selain itu target prolegnas selalu tidak tercapai. Lebih mengecewakan lagi, UU yang telah ditetapkan DPR pun begitu mudahnya diruntuhkan substansinya atas gugatan sekelompok kecil orang

yang mampu memaparkan kelemahan produk legislasi tersebut di hadapan Mahkamah Konstitusi. Parlemen lokalpun menampilkan masalah yang tidak kalah buruknya. Produktifitas Prolegda yang sangat rendah, didominasi perda usulan eksekutif dibandingkan perda inisiatif kemudian banyak Perda mengalami pembatalan dari *eksekutifreviewer* dalam hal ini Mendagri karena dinilai perda tersebut bertentangan dengan konsitusi yang lebih tinggi serta memberatkan masyarakat. Kemendagri sudah mengevaluasi 13.500 Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Masih ada 1.500 perda lagi yang menjadi target evaluasi Kemendagri. Dari 13.500 yang sudah dievaluasi, sudah 824 perda yang dibatalkan.³ Coba bayangkan jika dalam pembuatannya satu UU memakan milyaran uang rakyat atau jika satu perda memakan ratusan juta uang rakyat maka ada triliunan uang rakyat yang terbuang percuma.

Tidak ketinggalan pengaruh dua wajah diatas terhadap wajah ketiga partai yakni Wajah partai di level grass root atau masyarakat. Potret suram partai tentu mendapatkan reaksi yang cukup mengkhawatirkan dari publik terutama sikap yang antipartai. Kemerossotan legitimasi pemilu sebagai ajang pesta kedaulatan dan evaluasi rakyat atas pemerintahnya semakin menajam. Ketika reformasi, kita menyaksikan tingginya antusiasme rakyat menjemput kebebasan ditandai tingginya

¹ Data riset ICW 2007. Bahan Ajar Politik Anggaran. Ilmu Politik Fisip Unsoed.

² Info Korupsi.com. Berita Korupsi se-Indonesia. Beranda > Indonesia > 70 Persen Kepala Daerah Korupsi. Rabu, 29 Mei 2013. Diakses Senin, 3 Juni 2013.

³ www.detik news.com. Mendagri: 1.500 Perda akan Dievaluasi, 824 Sudah Dibatalkan. Kamis, 23/08/2012 15:34 WIB. Diakses tgl. 17 Juni 2013.

partisipasi dalam pemilu tahun 1999. Menurut Sofa Marwah, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 1999 mencapai 93,3%. Angka ini hampir berimbang dengan angka partisipasi pemilu 1955 yang mencapai 91,54%. Pasca 1999, dua pemilu selanjutnya kian memberi tanda-tanda memprihatinkan. Pemilu 2004 partisipasi masyarakat menurun menjadi 84,7% menyusul pemilu 2009 kembali merosot ke angka 70,99%.⁴

KPU pusat mencoba berusaha keras pada pemilu 2014 agar partisipasi masyarakat tidak merosot tajam, minimal bertengger pada angka 70%.⁵ Penurunan partisipasi ini acapkali dengan mudah mengalamatkan persoalan kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU sebagai pihak yang paling bertanggungjawab memaksimalkan sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat untuk memilih. Jarang dijadikan momentum bagi partai untuk mencari kesalahan diri dan kemudian memperbaikinya.

Selain penurunan partisipasi pemilih, terjadi pula fenomena tingginya tingkat *swing voters*. Pada setiap pemilu Orde Baru, Golkar meraih suara mayoritas hingga 70% suara. Namun, pada Pemilu 1999 perolehan suara Golkar menyusut menjadi 22,4%, PDIP berhasil meraup suara 33,7%, PPP (10,7%), dan partai-partai baru secara monumental masuk dalam jajaran partai

politik terbesar di Indonesia, seperti PKB (12,6%), PAN (7,1%) dan PBB (1,9%), dan PK (1,7%). Pada Pemilu 2004, terjadi pergeseran peringkat perolehan suara. Partai Golkar kembali menjadi pemenang pemilu dengan memperoleh suara 21,58%, diikuti oleh PDIP 18,53%, PKB 10,57%, PPP 8,15%, Partai Demokrat (7,45%), PKS (7,34%), PAN (6,64%). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey seperti LSI, LP3ES, IRI dst terhadap Pemilu 1999 dan 2004, ternyata ditemukan tingginya *swing voters* yang mengakibatkan perubahan perolehan suara dan peringkat partai politik.⁶

Perolehan suara pada pemilu 1999, 2004 hingga 2009 memperlihatkan terjadinya perubahan jumlah suara pada masing-masing partai. Fenomena melonjaknya suara PK dan PD di satu sisi justru mengurangi jumlah perolehan suara partai lainnya.

Selain tingkat partisipasi pemilih yang kian merosot dalam tiga kali Pemilu sebagaimana diulas sebelumnya, data ini juga menunjukkan bahwa dalam tiga kali Pemilu menghasilkan tiga partai berbeda yang mendapat suara terbanyak (PDIP 1999, Golkar 2004, dan Demokrat 2009); juga menghasilkan jumlah partai yang semakin banyak memperoleh di atas 3%: 5 partai pada 1999, 7 partai pada 2004, dan 9 partai pada 2009.⁷

⁴ Sofa Marwah. Menakar Harapan Meningkatkan Partisipasi Pemilu. Makalah Seminar KPU dan Jurpol Unsoed. 11 Maret 2013.

⁵ Pendapat ini disampaikan oleh anggota KPU Sigit Pamungkas pada seminar KPU *Goes to Campus*. Maret 2013 di Fisip Unsoed.

⁶ Riswandha Imawan, I Ketut Putra Erawan Dkk, "Parpol, Pemilu dan Parlemen : Agenda-agenda penguatan Parpol" PLOD & JIP UGM 2006. hlm. 38.

⁷ *Ibid.*

Data ini juga menandakan kian rapuhnya kemampuan elit partai merawat kredibilitas politiknya dimata rakyat. Masih mengembirakan jika pemilih ini mengkoreksi identifikasi partainya dengan menoleh ke partai lain yang lebih menjanjikan bagi perbaikan nasibnya, akan tetapi menjadi merisaukan jika akhirnya pemilih menilai tidak ada satupun partai yang bisa dipercaya lagi di Republik ini. faktanya, Indikasi kian banyaknya pemilih yang bersikap mengambang. Tiap Pilkada selalu terancam dimenangkan oleh pemilih Golput daripada kandidat partai politik. Indikasi bahwa hubungan partai dan pemilih sangat lemah sudah sangat jelas.

Jika hendak dimaknai lebih optimis maka partai-partai yang kehilangan banyak pemilih hendaknya mulai belajar mendeteksi sebab-sebab kerentanan loyalitas pemilih terhadap partainya. Partai baru juga bisa bersikap optimis bahwa pemilih Indonesia kian banyak yang masih bisa dipengaruhi berpindah partai ketika kita mampu menunjukkan kredibilitas politik yang lebih menjanjikan daripada partai sebelumnya. Pertanyaan kuncinya adalah dengan cara apa partai dapat menarik dan merawat simpati pemilih.

Mengapa Pengakaran Partai

Keterikatan partai politik kepada rakyat pada umumnya dan pada konstituen pada khususnya menjadi penting agar partai politik tidak hanya mengakar pada pengejaran kekuasaan pemerintahan. Ini juga akan menyeimbangkan arena kerja partai untuk tidak hanya berkuat

dan eksis pada saat pemilu, pilkada atau hanya pada wilayah pengambilan kebijakan pemerintah. Jika pengikatan atau pengakaran partai kepada masyarakat tidak dilakukan bisa menjebak partai hanya sibuk pada wacana kekuasaan tanpa sensitifitas terhadap kebutuhan menyikapi kebutuhan dalam masyarakat. Secara praktis tingkat pengakaran partai bisa dilihat dari kesetiaan terhadap basis pemilih partai untuk terus memilihnya dalam setiap pemilu dan apakah mereka memilih atas dasar pertimbangan yang rasional, yakni berdasarkan program kerakyatan yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu kegagalan melakukan pengakaran partai bisa berakibat berpindahnya suara dari para pemilih partai pada pemilu berikutnya atau bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap eksistensi partai disaat menduduki pemerintahan.⁸

Teori Tiga Wajah Partai Politik

Melihat partai politik perlu dilakukan secara utuh dan integratif, yakni pada tiga arena bekerjanya partai politik, atau tiga wajah partai politik. Ketiga arena atau wajah tersebut adalah partai pada akar rumput, partai pada parlemen dan partai pada lembaga-lembaga publik (eksekutif dan legislatif).⁹ Pengakaran

⁸ *Ibid.*

⁹ Richard S. Katz dan Peter Mair, *The Ascendancy of the party in public Office Party Organizational Change in Twentieth Century Democracies*, Chapter in *Political Parties, Old Concept and New Challenges*, Edited by Richard Gunter, Jose Ramon Montero and Juan Linz, Oxford University Press. 2002.

partai memiliki arti bahwa partai politik melalui kader dan aktivisnya bersentuhan langsung dengan konteks lokal, partai lokal, pendukung partainya maupun partai lain, serta masyarakat pemilih. Sebagai ujung tombak partai politik, pada level ini tugas utama kader dan aktivis partai adalah : (1) menunjukkan bahwa partai politik adalah agen yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat; (2) menunjukkan bahwa partai politik tumbuh dari dan bersama masyarakat; dan (3) menunjukkan bahwa partai politik adalah agen transformasi di dalam masyarakat.¹⁰

Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh partai politik untuk berhubungan atau menjalin komunikasi dengan pemilih, yaitu berhubungan secara langsung dan berhubungan secara tidak langsung.

Pertama, Hubungan Tidak Langsung. Iklan di televisi, radio, surat kabar sama seperti poster, billboard dan *gathering* hanya menyediakan arus informasi satu arah sehingga tidak ada terjadi informasi yang timbal-balik sehingga teknik atau metode tersebut tidak terlalu efektif. Namun demikian, model ini memiliki jangkauan publik secara luas dan seringkali relatif murah untuk beberapa teknik seperti *e-mail*, SMS, surat menyurat, poster dan Billboard, dan telepon. Sementara, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi iklan di televisi, radio dan surat kabar memiliki pengaruh yang besar

bagi masyarakat termasuk pemilih namun iklan di media massa tersebut sangatlah mahal. Meski demikian, partai politik dapat mensiasatinya dengan pemberitaan secara gratis. Maksudnya, partai politik dapat menyelenggarakan kegiatan yang diliput oleh wartawan dari media massa tersebut. Dalam beberapa penelitian, model pemberitaan (bukan iklan) lebih diterima oleh segmen pemilih tertentu.

Kedua, Hubungan Langsung. *Gathering, rally*, pertemuan-pertemuan kecil, interaksi *one-on-one* menyediakan kesempatan komunikasi dua arah. Dengan demikian, partai mendapat kesempatan menggali informasi dan pelajaran dari pemilih melalui dialog dengan mereka begitu juga sebaliknya. Momentum ini harus digunakan partai-partai politik untuk merekam informasi langsung dari pemilih. Hubungan langsung antara anggota partai dengan masyarakat ini merupakan cara efektif dalam memikat anggota baru dan dukungan, namun teknik atau metode ini akan menghabiskan banyak waktu dan mahal.

Menurut Arbi Sanit untuk menilai seorang wakil rakyat memiliki keterikatan terhadap regional dan orang yang diwakilinya maka terdapat empat macam responsifitas parpol : (1) Tanggapan yang berkenaan dengan kebijakan. Dalam hal ini bersangkutan dengan hubungan wakil dengan terwakil dalam hal pilihan kebijakan yang didukung oleh wakil. Disana terkait tingkah laku resmi wakil; (2) Bidang pelayanan. Tanggapan wakil

¹⁰ Riswandha Imawan, I Ketut Putra Erawan Dkk, "Parpol, Pemilu dan Parlemen : Agenda-agenda penguatan Parpol" PLOD & JIP UGM 2006. hlm. 62-63.

dalam bidang pelayanan berkaitan dengan keuntungan yang mungkin diberikan oleh wakil kepada terwakil. Untuk itu, wakil harus mengetahui keinginan dari terwakil dan karenanya kontak langsung dan intens serta multistakeholder penting dilakukan secara rutin; (3) Bentuk pengalokasian. Dalam hal ini tanggapan keterikatan wakil dapat dilihat dari keuntungan yang dapat diterima terwakil dari keputusan yang dibuat oleh wakil; (4) Tanggapan wakil dalam bentuk simbolik. Dalam hal ini menyangkut hubungan emosional antara wakil dengan terwakil.¹¹

Teori Fungsi Partai Politik

Sigit Pamungkas mengklasifikasikan fungsi partai politik menjadi 3 berdasarkan ranah cakupannya, yakni ranah parlemen, ranah organisasi dan ranah pemerintahan.¹² *Pertama* dalam ranah parlemen sebuah partai politik diartikan memiliki fungsi sebagai penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Adapun fungsi partai politik sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a) *Fungsi menyederhanakan pilihan pemilih.* Fungsi ini dimaknai sebagai peranan partai politik untuk menghubungkan antar individu dalam proses demokrasi terdiri dari menyederhanakan pilihan bagi pemilih. Hal tersebut dilakukan karena

pemilih dianggap mengalami kesulitan dalam memahami persoalan dan mengkonfrontasikannya berbagai isu pemilihan umum. Penyederhanaan pilihan pemilih ini merupakan wujud nyata dari upaya pelabelan partai, dimana pemilih dapat memperoleh kunci informasi dalam menginterpretasikan berbagai macam persoalan dan perilaku saat memilih.

b) *Fungsi edukasi.* Fungsi ini diartikan sebagai peranan partai politik sebagai sarana pendidikan politik untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Hal tersebut dilakukan partai politik dengan mendidik, menginformasikan, dan membujuk masyarakat untuk berperilaku tertentu. Pendidikan, transformasi informasi serta rayuan tersebut tentu dalam rangka mengembangkan tradisi dan budaya demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, apa yang dilakukan partai politik ini tentu dapat dianggap sebagai kursus demokrasi secara massal dalam suatu wilayah.

c) *Fungsi untuk membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas kepartaian.* Fungsi ini diartikan sebagai peranan partai politik dalam menjalankan fungsinya untuk membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas kepartaian, loyalitas terhadap partai politik akan menghindarkan warga negara terhadap kerentanan *terombang-ambing* oleh kepentingan kelompok tertentu, dimana keterikatan partisan terhadap

¹¹ Toni Andrianus Pito dkk "Mengenal Teori-Teori Politik : Dari Sistem Politik Sampai Korupsi" Penerbit Nuansa. Bandung. 2006. hlm. 16

¹² Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta : Institute for Democracy and Walfarism (IDW)

partai politik dapat melestarikan dan menstabilkan pemerintahan yang demokratis serta menciptakan kesinambungan pilihan pemilih dan hasil pemilih. Dalam membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas terhadap partai politik di parlemen, partai politik menyediakan basis identifikasi politik yang terpisah dari negara, dimana ketidakpuasan terhadap kinerja hasil lembaga pemerintahan tertentu dapat ditunjukkan secara langsung secara spesifik dibandingkan negara itu sendiri.

d) *Fungsi mobilisasi partisipasi masyarakat.* Dalam hal ini partai politik memainkan perannya dengan meningkatkan keaktifan organisasi penyokong sebagai sayap partai untuk mendorong mobilisasi pemilih, dimana penonjolan rasa keterikatan terhadap partai politik dianggap mampu memotivasi pemilih untuk memilih karena dianggap sebagai *user-friendly* oleh pemilih. Hal tersebut tentu berdampak langsung terhadap penurunan angka pembiayaan pemilihan, dan peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan partai tentu dapat meningkatkan manfaat bagi masing-masing pendukung partai.

Kedua, partai politik sebagai organisasi politik (*parties as organization*) diartikan sebagai proses internal partai politik sebagai sebuah organisasi politik. Adapun beberapa fungsi partai politik

sebagai organisasi politik tersebut antara lain terdiri dari :

a) *Fungsi seleksi dan mendesain kandidat yang akan didukung.* Fungsi ini dimaknai sebagai peranan partai politik untuk melakukan pengamatan dan menciptakan scenario pengusungan kandidat yang akan dinominasikan dalam sebuah pemilihan. Hal tersebut dikenal dengan istilah rekrutmen kepemimpinan politik, dimana desain rekrutmen tersebut dapat dijadikan partai politik untuk seleksi kandidat, aktor yang melakukan seleksi, aktor yang menetapkan hasil seleksi, dan aktor yang menetapkan nominator, hingga menilai derajat demokratisasi dan desentralisasi penyelegaraan pemilihan umum.

b) *Fungsi pembekalan elit potensial.* Fungsi ini diartikan sebagai peranan partai politik untuk membekali elit politik mereka dengan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap elit yang dianggap prospektif atau potensial untuk mengisi jabatan politik tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan membekali elit politik partai sebagai sebuah organisasi dilakukan dengan memberikan materi pelatihan yang meliputi pemahaman terhadap nilai, norma, dan perangkat demokrasi, serta berbagai macam persoalan strategis dan alternatif pilihan dari permasalahan yang ada dan diharapkan mampu

meramalkan figur potensial yang akan diposisikan oleh partai politik.

- c) *Fungsi artikulasi kepentingan.* Fungsi ini diartikan sebagai upaya partai politik untuk mengartikulasikan kepentingan politik golongan fungsionalis-struktural guna menyuarakan kepentingan pendukung partai melalui pilihan posisi (jabatan) dan berbagai isu politik. Hal tersebut dilakukan dengan mengekspresikan pandangan pengikutnya dalam pemerintahan. Sentralisasi struktural fungsi vital partai sebagai organisasi politik dapat terlihat lewat kampanye, debat legislatif, dan pengarahannya langsung yang dilakukan oleh para politisi untuk merepresentasikan kepentingan pendukungnya.
- d) *Fungsi agregasi kepentingan.* Dalam hal ini partai politik memiliki peranan untuk mengagregasikan kepentingan kelompok tertentu yang akan disuarakan dan ditransformasikan ke dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan seleksi tuntutan dari masing-masing kelompok kepentingan untuk mencari kesamaan tuntutan kolektif untuk kemudian dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam alternatif-alternatif kebijakan ataupun program pemerintah.

Ketiga fungsi partai politik di ranah pemerintahan diartikan sebagai upaya pengelolaan dan restrukturisasi persoalan-persoalan pemerintahan. Dalam hal ini upaya untuk mengelola dan restrukturisasi

persoalan-persoalan pemerintahan tersebut terdiri dari :

- a) *Fungsi mengupayakan mayoritas pemerintahan.* Fungsi ini dimaknai sebagai peranan partai politik untuk mengupayakan dan mengkondisikan mayoritas pemerintahan. Hal tersebut dilakukan oleh partai politik yang memiliki perwakilannya di parlemen untuk masuk ke ranah eksekutif pemerintahan, dimana partai politik dapat melakukan koalisi untuk membentuk sebuah pemerintahan dengan distribusi sumber daya dan posisi kebijakan partai yang kuat.
- b) *Fungsi pengelolaan pemerintahan.* Fungsi ini dimaknai sebagai peranan partai politik untuk mengorganisasikan penyelenggaraan sebuah pemerintahan, dimana partai politik menyediakan mekanisme pengorganisasian kepentingan dengan menjamin kerjasama antar individu dengan legislator. Dalam hal ini disiplin partai merupakan mekanisme kontrol yang dilakukan untuk mengawasi legislator dan disiplin partai, pengawasan terhadap kepemimpinan parlemen dan kelengkapannya, hingga pengawasan terhadap distribusi sumber daya parlemen kepada legislator.
- c) *Fungsi mengimpelementasikan tujuan kebijakan.* Fungsi ini dimaknai sebagai peranan partai politik untuk mewujudkan tujuan kebijakan mereka. Hal ini diwujudkan dengan mentransformasikan nilai-nilai yang

dijanjikan oleh kepala daerah selama masa kampanye kedalam rumusan kebijakan pemerintah.

- d) *Fungsi pengelolaan ketidaksepakatan oposisi.* Fungsi ini dimaknai sebagai peranan partai politik untuk mengorganisir ataupun mengelola ketidaksepakatan oposisi pemerintahan, dimana hal tersebut dilakukan oleh partai oposisi pemerintahan yang tidak berasal dari internal kekuasaan dengan tujuan untuk meraih simpati masyarakat sehingga memperbesar peluang menang dalam pemilihan selanjutnya.
- e) *Fungsi pertanggung-jawaban pemerintahan.* Fungsi ini dimaknai sebagai bentuk pertanggung jawaban partai pendukung pemerintahan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan, dimana partai penguasa merupakan penanggung jawab penuh kebijakan pemerintahan. Hal ini dianggap dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan rezim pemerintahan, dimana kepuasan masyarakat akan ditunjukkan melalui keberpihakan suara mereka untuk memilih partai penguasa ataupun partai oposisi pemerintahan di periode selanjutnya.
- f) *Fungsi pengawasan administrasi pemerintahan.* Fungsi ini dimaknai sebagai usaha kontrol terhadap administrasi pemerintahan dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja birokrasi dalam pemerintahan. Hal tersebut dilakukan melalui seleksi terhadap figur tertentu untuk menempati jabatan politik tertentu guna

ditunjuk untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan dan demokrasi melalui penciptaan stabilitas kekuasaan dalam pemerintahan.

Penyakit Partai

1. Miskin Kader

Salah satu tugas pokok partai politik adalah mempersiapkan kandidat politik yang bertugas memenangkan posisi politik diri dan partainya kemudian terlibat aktif dalam proses membentuk dan menjalankan pemerintahan. Karena konteks sistem politik yang kita anut adalah demokrasi maka parpol dituntut menampilkan kemampuan berdemokrasi sejak dari internalnya. Proses kandidasi politik dalam suksesi merupakan arena yang kerap kali menihilkan demokrasi dan berubah menjadi politik oligarkhi, menjadi rumit menjamin kadernya yang terpilih sebagai pejabat publik jika sejak kandidasinya tidak menjunjung semangat demokrasi.

Penelitian LSM STI Yogyakarta menilai Reformasi partai politik pada aspek kandidasi selama ini mengalami hambatan struktural, karena dua alasan pokok. *Pertama*, struktur partai politik yang sentralistik. *Kedua*, butuh *political will* (kehendak politik) dari pemimpin partai menginisiasi reformasi. Tanpa leadership dan dukungan pemimpin, pihak lain yang mencoba mereformasi dari internal bisa jadi dinilai sebagai musuh bersama dan akhirnya tersingkir.¹³

¹³ I Ketut Putra Erawan, Miftah Adhi Inchsanto dkk, Reformasi Partai Politik di Tingkat Lokal. Proceeding Riset Kerjasama dengan UNDP dan STI Yogyakarta. 2008. hlm. 14.

Banyak pula kita menyaksikan partai lamban memperkuat sayap partai. Sementara sayap partai merupakan perpanjangan tangan partai melakukan interaksi sosial dengan pendukung dan masyarakat umum. Aktivis mahasiswa, kelompok agamawan, aktivis perempuan adalah daftar orang-orang yang merasa tidak nyaman dan tidak diberi tempat dalam partai. Kecerdasan mereka dipandang berpotensi merusak tatanan internal partai. Akibatnya partai gagal menemukan inspirasi dan terobosan pengakaran politik.

Problem selanjutnya kandidasi cenderung mengukur kesiapan modal finansial kandidat daripada tingkat kaderisasi dan pembasisannya kepada konstituen partai. Lambat laun kebesaran ideologi, insitansi dan aturan main partai cenderung dikalahkan oleh superioritas individu. Ikatan artifisial materi seperti ini kerap menjadi masalah tersendiri bagi partai dikemudian hari. Ketika seorang kandidat merasa dirinya hanya membeli kendaraan partai maka tingkah politiknya akan sulit terkontrol. Pilihan sikap dan kebijakannya akan menihilkan pertimbangan ideologi dan kebutuhan konstituen partai. Ketika politisi seperti ini terjebak masalah demoralisasi politik maka justru partai yang pertama kali terkena imbasnya yang kemudian berimbas pada demoralisasi konstituen kepada partai.

2. Miskin Metode

Ketidakmampuan partai merekam dan berempati atas masalah sensitif publik dikarenakan struktur kelembagaan partai yang tidak akomodatif terhadap tuntutan publik. Partai gagal menciptakan ruang

publik yang memajukan partisipasi publik dan memandirikan kader mengekspresikan prestasi politiknya. Partai masih terjebak dengan romantisme masa lalu sebagai daya pengikat partai dengan massanya, tidak menghiraukan kegelisahan sosial di dalam masyarakat yang bisa jadi tidak berbau simbolik dan kultural lagi. Publik butuh program inovatif, butuh kesejahteraan, butuh pemimpin yang memberi teladan dan butuh pemimpin yang senantiasa hadir sebagai pejuang ketika mendapatkan masalah.

Begitu banyak program-program inovatif pemimpin daerah yang justru mendapatkan penentangan dari kalangan kader partai politik terutama yang duduk di pemerintahan baik di eksekutif ataupun di legislatif. Inovasi akhirnya tersendat karena minim dukungan politik yang pada gilirannya menyumbat potensi keberlanjutan program inovasi karena minim regulasi dan anggaran. Seolah tidak peduli jika rakyat begitu banyak merindukan inovasi itu dan jika politisi berani bertindak kontraproduktif bisa melemahkan diri dan partainya kedepan.

Ketika masyarakat terlibat konflik horizontal, konflik perburuhan, konflik petani, konflik dengan pemerintah maka partai politik sering alpa hadir memberi bantuan dan empati. Argument yang sering muncul, bahwa itu tugas pemerintah, itu tugas aparat, itu tugas instansi terkait dan sebagainya. Bukankah partai memiliki jaringan organisasi di daerah masyarakat tertimpa masalah tersebut, terdapat anggota legislatif yang Daerah pemilihannya

(DAPIL) di daerah tersebut. Elit yang mendapatkan mandat publik melakukan pembiaran atas nasib konstituennya. Terlepas kehadiran partai dapat memberi solusi ataupun tidak, yang terpenting adalah ikatan simbolik dan mediator konflik bisa diperankan. Kontribusi itu bisa meringankan persoalan masyarakat sekaligus meningkatkan legitimasi diri dan partai nantinya.

Kemampuan agregasi dan menghadirkan diri ditengah masyarakat adalah kebutuhan mendasar partai modern. Menurut Dr. I Ketut Putra Erawan bahwa partai kerap mengalami dilemma, apakah memotret Proritas Konstituen atau Publik?¹⁴ Dalam melakukan agregasi kepentingan, partai diharapkan memiliki ideologi, program, atau visi yang menjadi landasan penyeleksian dan proses agregasi. Untuk partai massa, maka kepentingan konstituen yang akan menjadi basis pertimbangan agregasi. Partai kader akan lebih melihat kepentingan kadernya dalam agregasi kepentingan tersebut. Bagi partai yang berkarakter *catch-all* seperti Golkar, maka persoalannya menjadi problematik. Siapa sebenarnya konstituen kalau posisi partai dalam berbagai kebijakan berada ditengah dalam spektrum ideologi? Kalau prioritas diberikan pada kepentingan publik, maka itu mungkin akan bisa memperluas dukungan publik tetapi mereka tidak bisa diubah menjadi konstituen yang loyal. Program yang bersifat umumpun tidak bisa

diklaim sebagai kontribusi Golkar saja. Ketidakmampuan membedakan kontribusi partai dari partai lain – dalam pandangan teori aksi kolektif – sama saja dengan tidak berbuat apa-apa.

Barbara Geddes misalnya melukiskan dilema yang dihadapi politisi dalam memilih kepentingan yang harus diperjuangkan. Politisi akan mengalami dilema apakah akan membuat kebijakan yang pro-konstituen sehingga akan didukung lagi dalam pemilu (*partisanship*); atau berupa konsesi untuk lawan politik sehingga akan didukung kekuatan politik itu (*survival*); ataukah pertimbangan kebutuhan riil dari publik; ataukah kombinasi dari pertimbangan-pertimbangan diatas untuk mengurangi risiko (*comparmentalization*).¹⁵

Pilihan-pilihan Perbaikan Partai

1. Reformasi Sistem Kaderisasi Partai

Kandidat publik yang dipersiapkan partai politik selayaknya adalah orang-orang yang memiliki mindset dan kemampuan agregasi kepentingan konstituen dan publik untuk diperjuangkan dalam politik kebijakan pemerintah. Cermin miskinnya inovasi dan inisiatif kebijakan dari anggota parlemen lokal dan nasional menunjukkan ketidaksiapan mereka menjadi wakil politik ideal. Tanggungjawab pembenahan tidak hanya berada ditangan orang per orang di pemerintahan akan tetapi partai bisa berkontribusi melalui berbagai program penyiapan kader politiknya.

¹⁴ Karl-Heinz Nassmacher, "Regulation of Party Finance," in Richard S. Katz and William Crotty, *Handbook of Party Politics*, London, Thousand Oaks, New Delhi, 2006: pp. 446-455.

¹⁵ Barbara Geddes, *Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America*, Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press

Belum banyak kita menyimak pola praktis partai melakukan pendidikan kader. Selama ini kader lebih identik sebagai aktor yang bertugas melakukan fungsi-fungsi suksesi semata. Melakukan penjangkauan, pengalangan massa, orasi dan agitasi, hingga yang terparah, sekedar penjaga keamanan partai. Penyakit oligarkhi pengkaderan dan kandidasi partai juga dapat diamputi ketika partai menghilangkan oligarkhi dalam pendanaan partai politik. Demokrasi langsung memang mahal dibandingkan sistem otoriterian. Loyalitas dan simpati pemilih hanya dapat terbangun melalui interaksi langsung dan berkesinambungan. Apakah lagi ketika uang dipakai untuk membeli loyalitas tersebut. Kerentanan infiltrasi uang sebagai logika tunggal menggerakkan partai dan pemilih memang masih berada pada konvergensi pemikiran para pemerhati demokrasi. Versi aktivis politik menilai Negara perlu bersikap tegas dan kongkret dalam UU Pemilu agar kampanye diatur lebih transparan dan murah. Versi pemerintah melihat tidak ada kewenangan Negara mengatur aspek karena merupakan kebebasan politik seseorang.¹⁶ Akhirnya obat pelipur lara dikembalikan pada kapasitas dan ketegasan kerja penyelenggara pemilu dan sikap kritis dari partai yang bersaing.

Sementara bagi kader anggota legislatif agar mampu melakukan agregasi maka perlu diperkenalkan kurikulum kajian masalah publik hingga metode penyusunan kebijakan (*legal drafting*). Sebagai contoh:

¹⁶ Kompas, Senin, 3 Juni 2013: Kampanye Pilkada: Pembatasan Dana Cegah Korupsi.

partai bisa memberi kursus politik bagi kader partainya yang terpilih melalui kursus politik dalam waktu yang memadai misalnya selama 6 bulan atau satu semester di suatu universitas. Selama waktu itu, anggota legislatif belajar mengidentifikasi masalah publik, konstelasi politik partai dan nasional, inovasi pembangunan, kepemimpinan politik, komunikasi politik, politik anggaran, hak-hak konstitusional, teknik perumusan UU dan sebagainya. Sekarang terdapat beberapa inisiatif penggiat organisasi masyarakat sipil dan universitas menawarkan program-program sekolah politik bagi kader dan anggota legislatif partai walau disadari komitmen dan antusiasme masih sangat minim dari partai untuk terlibat.

Tengoklah fenomena *Jokowi Effect* yang kian menghipnotis alam kesadaran masyarakat seantero nusantara. Jokowi hadir sebagai antitesa konstelasi internal partai dan antar partai dalam suksesi. Jokowi adalah jawaban kegagalan oligarkhi kandidasi PDIP yang kerap didominasi politisi "tua" dan orang dekat Megawati. Jokowi adalah pemimpin muda, pendatang baru dan nasionalis abangan. Jokowi juga mampu mematahkan mitos kompetisi antar partai yang mengenal kandidat *incumbent*, berduit banyak, orang asli, wilayah basis. Jokowi menang mengalahkan incumbent, modalnya tidak sebanyak kandidat lain, bukan orang asli Jakarta dan bukan wilayah basis PDIP. Lambat laun PDIP mulai menyadari pentingnya membuka ruang lebih leluasa pada kader-kader pemimpin

mudanya untuk tampil memenangkan berbagai suksesi.

Aktor lain seperti Negara, *civil society* dan penyelenggara pemilu juga mulai serius memaksa partai agar lebih demokratis mengelola partainya. Misalnya dalam urusan memperoleh dan mengelola keuangan partai politik. Partai harus dipaksa transparan dan rasional mengelola dana mulai dari pembatasan jumlah sumbangan, pengawasan praktek *money politic* hingga keharusan melakukan pendidikan politik. Pembatasan logika uang akan membatasi *money politik* dan politik transaksional. Partai akan terdorong mengadaptasi strategi pengakaran politik yang lebih rasional misalnya rembuk warga, bakti sosial, bantuan produktif, sukarelawan bencana dan sebagainya.

2. *Revitalisasi Sayap Partai*

Sayap partai merupakan media kaderisasi politik sekaligus saluran-saluran politik partai berhubungan dengan masyarakat. Dengan berjalanya fungsi-fungsi ini disatu sisi akan membantu pengurus partai dan wakil-wakil partai di pemerintahan (legislatif dan eksekutif) dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui berbagai kebijakan pemerintah. Di sisi lain, ini juga akan menyeimbangkan arena kerja partai untuk tidak hanya berkutat dan eksis pada saat pemilu atau hanya pada wilayah perebutan kekuasaan ditubuh pemerintah.¹⁷

¹⁷ Menurut kajian Riswandha Imawan bahwa sangat mungkin sindrom ini akibat dari kesalahan sejak lahir, parpol di Indonesia yakni parpol dikonsepsikan sebagai instrumen merebut

Organisasi partai yang memiliki intensitas tinggi berinteraksi dengan publik idealnya banyak diperankan oleh organisasi level terendah seperti yang berkedudukan di desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten selain itu yang patut diperhitungkan adalah keberadaan organisasi sayap partai.

Sebagai contoh, akibat beberapa partai Islam kian menguat menaikkan kelasnya dari partai kecil ke partai kelas menengah maka beberapa partai besar mulai kehilangan loyalitas pemilih utamanya dari kalangan nasionalis religius, santri perkotaan, pemilih pemula dan perempuan. PDIP adalah salahsatu partai yang merasakan gejala tersebut. Didalam tubuh PDIP sendiri terdapat beberapa organisasi sayap partai yang terbentuk dari level pusat hingga daerah karena memang merupakan kebijakan dari pusat. Organisasi sayap PDIP tersebut seperti: Taruna Merah Putih, Banteng Muda Indonesia, Baitul Muslimin.

Baitul Muslimin merupakan organisasi sayap partai terbaru yang di bentuk atas inisiasi DPP PDIP pada tahun 2008 yang diperuntukkan menggarap kalangan muslim nasionalis. Baitul Muslimin merupakan organisasi sayap partai terbaru yang di bentuk atas inisiasi DPP PDIP pada tahun 2008 yang diperuntukkan menggarap kalangan muslim nasionalis.

kekuasaan demi penjajah. Ketika berhasil direbut, maka sulit mencegah sikap rebutan kekuasaan diantara mereka. Lihat: Riswandha Imawan, *Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*, Working Paper Edisi No.1 Pascasarjana Program Ilmu Politik UGM & Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM. Yogyakarta. 2007.

Keberadaan organisasi sayap partai ini menarik dikaji dalam konteks DPD PDIP Sul-Sel dibawah kepemimpinan HZB Palaguna mengingat ada sebuah organisasi sayap partai yang diinisiasi oleh istri beliau, Normi Palaguna dan hanya ada di Sul-Sel sebagaimana pernyataan berikut ini: "Masita itu hanya ada Sulawesi-Selatan tapi gaungnya nasional, dan rencananya akan ditawarkan sebagai model kebijakan nasional PDIP. itu ketuanya ibu Normi istrinya Puang.¹⁸ Organisasi yang dibentuk tahun 2007 ini memiliki tujuan menyisir semua konstituen yang dilewatkan oleh PDIP. Masita adalah organisasi yang diisi oleh perempuan dari istri kader, pengurus dan simpatisan PDIP."¹⁹

Kemampuan pemimpin partai di level lokal menangkap peluang-peluang baru pengakaran partai dengan menampilkan wajah sosial partai menjadi bentuk usaha partai mendinamisasi dan memodernisasi pola-pola pendekatannya kepada publik calon pemilihnya. Citra baru yang ingin ditunjukkan dengan adanya Masita agar di Sul-Sel ibu-ibu juga aktif digerakkan sama sayap partai yang bergerak dibidang sosial utamanya kegiatan kesehatan. Karena beliau berpengalaman sebagai mantan Ibu Gubernur membuat kegiatan perempuan dan memperkenalkan PDIP lewat kegiatan

sosial khususnya kesehatan.²⁰

Pemilih dari kalangan perempuan nampaknya ditangkap sebagai basis lama yang selama ini tidak tergarap serius oleh PDIP. Tidak terbantahkan bahwa partai seperti PKS yang secara terorganisir memperkenalkan partai dalam bentuk berbagai kegiatan sosial dalam politik keseharian (*daily politics*) cukup membantu mempopulerkan partai dalam wajah yang lebih sejuk karena aktivitasnya jauh dari momen politik.

Ini menandakan sensitifitas partai menangkap celah dalam memperluas dan mempererat basis sosialnya. Basis sosial dan dinamika konstituen ataupun pemilih berpengaruh pada preferensi pilihan saat pemilu. Meskipun realitas ini menunjukkan fakta dimana perilaku partai politik tidak secara tegas menunjukkan korelasi dengan ideologi yang menjadi basis perumusan dan penetapan agenda.

3. *Tampil Programatik dan Populis*

Tampil programatik tercermin dari visi dan program kerja partai hingga gagasan yang berkembang dikalangan kandidat politik partai. Resep mengobati perpindahan suara partai dan golput yang kian massif telah banyak merugikan partai-partai tua. Golkar adalah salah satu partai yang kian risau akan gejala tersebut. Dalam konteks nasional dan lokal partai Golkar mencoba member jawaban mengingat berkali-kali suksesi tingkat nasional dan lokal partai ini semakin rendah tingkat keterpilihannya.²¹

¹⁸ Tesis: Andi Ali Said Akbar, Militer dan Partai Politik: Modalitas Tokoh Militer Mayjend (Purn) H. Z.B. Palaguna dalam Mengkonsolidasikan DPD PDIP Sul-Sel Pasca Konflik Konferda 2006. UGM 2009. hlm. 124.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Tiga kali Pilpres Indonesia sejak reformasi 1999, 2004 dan 2009 kandidat Presiden dari partai

Guna menjemput simpati masyarakat maka secara nasional Partai Golkar menjadikan jargon GAB : Gerakan Ayo Bangkit sebagai program yang mencerminkan identitas politiknya. Penguatan UMKM adalah isu sentral yang terus didengungkan terutama oleh Ketua Umum sekaligus Capres partai Golkar 2014 : Aburizal Bakrie.²²

Jargon ini pula yang mulai membahana di wilayah Banyumas mengingat partai Golkar salahsatu partai besar pemegang kursi di DPRD Banyumas. Selain faktor politis diatas, program penguatan UMKM juga sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Banyumas. Kota yang semakin bergerak sebagai kota jasa, pendidikan serta pertanian ini semakin tertantang untuk membangkitkan ekonomi masyarakatnya. Kabupaten yang masih didera tingkat pengangguran yang tinggi, disparitas pendapatan desa dan kota yang menajam serta kegiatan UMKM yang masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Dengan konstelasi demikian, partai harus mempersiapkan infrasturktur program yakni kapasitas kader partai Golkar Banyumas serta UMKM dampinganya dalam menerapkan program kemasyarakatan tersebut. Kemampuan mengawal meliputi kemauan

dan kemampuan mengimpelemntasikan program membangkitkan UMKM secara nyata dan bermanfaat bagi masyarakat Banyumas.

Nampaknya mulai ada keinginan partai untuk berbenah walau masih bersifat parsial. Ada yang menunggu inisiasi dari level pusat, ada yang bergerak di lokal tapi pusat tidak tertarik mengadopsi, hingga belum menjadi sikap semua partai. Muara dari seluruh kajian diatas hendak menyampaikan pesan bahwa tantangan zaman partai politik hari ini adalah transformasi dan reformasi diri. Partai harus membangkitkan kemampuan transformatif modal tradisionalnya sebagai jawaban kebutuhan konstituen hari ini. Masyarakat tidak butuh lagi sekedar ikatan simbolik berbau agama, ideologi, uang ataupun terah keturunan politisi. Ditengah kehidupan masyarakat yang kian cerdas, dengan iklim demokrasi yang kian kompetitif maka rakyat membuthkan partai yang mampu menjawab kebutuhan realnya, rakyat merindukan pemimpin yang memberi teladan dan bersedia hadir memberi solusi atas masalahnya.

Golkar tidak pernah memenangkan pemilihan; pada Pilkada Golkar mengklaim memenangkan 51% pilkada di seluruh Indonesia meskipun perlu diingat bahwa yang terpilih tidak sepenuhnya kader Golkar dan kemenangan tersebut juga ditentukan oleh koalisi partai.

²² <http://www.bersamabangkit.com/news/golkar-bangkitkan-gairah-ekonomi-rakyat>, akses: 16 okt 2012, (10:45 WIB)

Daftar Pustaka

- Akbar, Andi Ali Said. 2009. *Militer dan Partai Politik: Modalitas Tokoh Militer Mayjend (Purn) H. Z. B Palaguna dalam Mengkonsolidasikan DPD PDIP Sul-Sel Pasca Konflik Konferda 2006*. UGM 2009. (Tesis).
- Data riset ICW 2007. Bahan Ajar Politik Anggaran Ilmu Politik Fisip Unsoed.
- Erawan, I Ketut Putra, Miftah Adhi Ichsanto dkk. 2008. *Reformasi Partai Politik di Tingkat Lokal*. Proceeding Riset Kerjasama dengan UNDP dan STI Yogyakarta.
- Geddes, Barbara. *Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America*, Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press.
- Imawan, Riswandha, I Ketut Putra Erawan dkk. 2006 *Parpol, Pemilu dan Parlemen: Agenda-agenda penguatan Parpol*. PLOD & JIP UGM.
- Imawan, Riswandha. 2007. *Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*, Working Paper Edisi No.1 Pascasarjana Program Ilmu Politik UGM & Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM. Yogyakarta.
- Katz, Richard S. dan Peter Mair. 2002. *The Ascendancy of the party in public Office Party Organizational Change in Twentieth Century Democracies, Chapter in Political Parties, Old Concept and New Challenges*, Edited by Richard Gunter, Jose Ramon Montero and Juan Linz, Oxford University Press.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta : Institute for Democracy and Walfarism (IDW).
- Pito, Toni Andrianus dkk. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik : Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Penerbit Nuansa. Bandung.
- Marwah, Sofa. 2013. *Menakar Harapan Meningkatnya Partisipasi Pemilu*. Makalah Seminar KPU dan Jurpol Unsoed. 11 Maret 2013.
- Nassmacher, Karl-Heinz. 2006. "Regulation of Party Finance," in Richard S. Katz and William Crotty, *Handbook of Party Politics*, London, Thousand Oaks, New Delhi.
- Koran dan Internet:**
- <http://www.bersamabangkit.com/news/golkar-bangkitkan-gairah-ekon...>, akses: 16 okt 2012, (10:45 WIB)
- Info Korupsi.com. Berita Korupsi se-Indonesia. 70 Persen Kepala Daerah Korupsi. Rabu, 29 Mei 2013. Diakses Senin, 3 Juni 2013.
- Kompas, Senin, 3 Juni 2013: Kampanye Pilkada: Pembatasan Dana Cegah Korupsi.
- Kompasiana. DPR Pembolos itu Orang-orang TOP | 28 May 2013 | diakses 3 Juni 2013.